

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan :

1. Hasil penelitian membuktikan bahwa opini audit berpengaruh negatif terhadap persepsi korupsi, dimana semakin baik opini audit yang diperoleh maka pemerintah daerah memiliki persepsi korupsi yang lebih rendah.
2. Kelemahan Sistem Pengendalian Interen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara statistik tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah. Hal ini berarti banyak sedikitnya kasus dalam Kelemahan Sistem Pengendalian Interen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah belum mampu menurunkan tingkat korupsi pada pemerintah daerah.
3. Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara statistik tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah. Hal ini berarti banyak sedikitnya kasus dalam Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah belum mampu menurunkan tingkat korupsi pada pemerintah daerah.

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, sampel penelitian ini sangat terbatas pada jumlah daerah yang sangat minim yaitu hanya 30 kota yang mendapatkan survei dari TII tentang IPK.

Kedua, peran auditor untuk mendeteksi adanya tindakan korupsi di pemerintah daerah dalam penelitian ini hanya dilihat dari pemberian opini audit, mendeteksi adanya temuan audit, dan peran auditor dalam memantau tindak lanjut hasil audit yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Masih banyak faktor-faktor lain yang terkait dengan peran auditor yang dapat digunakan dalam penelitian terkait korupsi misalnya dilihat dari kualitas audit.

Ketiga, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dalam penelitian ini bukan sebagai pengukuran dari tingkat korupsi secara langsung melainkan mengukur persepsi atas tingkat korupsi di pemerintah daerah sehingga diperlukan pengukuran lain untuk melihat tingkat korupsi secara langsung misalnya menggunakan data jumlah kasus korupsi yang terjadi atau melakukan analisis pemerintah daerah yang masuk ke dalam proses penindakan di KPK.

C. Implikasi Hasil Penelitian

Berdasarkan analisis hasil penelitian, terdapat beberapa implikasi yang bisa disampaikan. Pertama, dari penelitian ini diketahui bahwa secara rata-rata IPK dari sampel penelitian menunjukkan hasil yang kurang baik atau

persepsi terhadap perilaku pemerintah daerah yang melakukan tindakan korupsi masih tinggi. Bagi pemerintah pusat, IPK dapat dijadikan pemetaan awal untuk mengetahui daerah-daerah yang dipersepsikan memiliki tingkat korupsi yang tinggi sehingga pemerintah pusat dapat meningkatkan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah tersebut. Selain itu, penelitian ini juga mendukung program pemberian reward untuk pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP, karena hasil pengujian dalam penelitian ini membuktikan bahwa semakin baik opini audit yang diperoleh secara signifikan berpengaruh terhadap penurunan persepsi korupsi.

Kedua, pemerintah daerah sebaiknya memperkuat sistem pengendalian yang terkait dengan akuntansi dan pelaporan serta sistem pengendalian dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah karena kedua kelemahan ini mendominasi dalam daftar jumlah temuan audit atas kelemahan sistem pengendalian intern pemerintah daerah. Selain itu, dilihat dari daftar jumlah temuan audit atas ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan, pemerintah daerah masih banyak melakukan pelanggaran administrasi meskipun tindakan tersebut tidak mengakibatkan kerugian daerah secara materil. Namun, pemerintah daerah tetap harus memperhatikan tata cara atau prosedur penyelenggaraan pemerintahan agar pelanggaran administrasi dapat diminimalisir. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah daerah perlu mewaspadaai adanya pelanggaran terhadap peraturan dan perundang-undangan selama proses penyelenggaraan pemerintahan, terutama untuk tindakan yang dapat menimbulkan kerugian negara termasuk

yang masih bersifat potensi karena kedua hal tersebut secara signifikan berpengaruh terhadap persepsi korupsi.

D. Saran Penelitian Lanjutan

Untuk peneliti selanjutnya hendaknya mampu mengembangkan model penelitian ini dengan sampel yang lebih besar, dan sistem pengukuran indeks korupsi yang berbeda, misalnya menggunakan data-data Kejaksaan tentang jumlah kerugian negara akibat kasus korupsi yang dilakukan pejabat publik yang kasusnya telah ditangani oleh KPK dan Kejaksaan dan telah divonis bersalah.